



## DPRD Kalbar Minta Pembkab Cabut Izin PT PSP HPI Agro

**PONTIANAK** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat bergerak cepat dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait konflik inti plasma PT Peniti Sungai Purun (PSP) HPI Agro.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



Sambungan dari halaman 9

Legislatif Kalbar meminta Pemkab menindaklanjuti terkait revisi kerja sama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan.

Surat rekomendasi bernomor 162/145/DPRD - C dikeluarkan pada hari Senin (11/7) tahun 2022. Ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalbar, M. Kembang dan ditembuskan kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji, dan Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan.

Ketua DPRD Kalbar, M. Kembang menyebutkan bahwa Komisi II DPRD yang membidangi perekonomian sudah melaksanakan rapat kerja membahas revisi kerja sama pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dengan petani plasma dan PT. PSP HPI Agro.

Rapat tersebut digelar pada 28 Juni 2022 dipimpin langsung Ketua Komisi II, Affandie AR bersama Wakil Ketua Komisi II, Suib. Rapat itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota komisi, perwakilan Polda Kalbar, dinas terkait, Pemerintah Provinsi

Kalbar, dan Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama pihak-pihak terkait lain.

Pada rapat tersebut, petani plasma meminta agar pihak perusahaan PT. PSP HPI Agro merevisi kembali nota kesepakatan yang dianggap tidak berpihak ke mereka. Revisi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani plasma, yang selama ini hanya menerima hasil per hektar antara Rp50 ribu sampai Rp70 ribu per bulan.

"Kedua belah pihak awalnya sepakat melakukan revisi kesepakatan. Namun setelah berita acara dibuat pihak perusahaan menolak untuk menandatangani berita acara," tulis surat yang ditandatangani M. Kembang, Senin (11/7).

Karena tidak adanya kesepakatan bersama, Komisi II DPRD Kalbar bersama dengan anggota yang hadir dalam rapat sepakat memberikan rekomendasi. Pertama, meminta agar permasalahan revisi kerja sama pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dengan petani plasma dan PT. PSP HPI Agro

untuk selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Mempawah diharapkan dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional kebun PT. Peniti Sungai Purun (PSP) HPI Agro Kabupaten Mempawah.

Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie AR menyebutkan perusahaan sama sekali tidak ada empati ke petani plasma, dengan tidak mau menekan kesepakatan penyelesaian. DPRD Kalbar memang sudah seharusnya menyurati Pemkab Mempawah untuk terus menindaklanjuti hasil pertemuan.

"Setuju pembekuan perizinan IUP konsensi lahan sawit tersebut pada jangka waktu tertentu. Harusnya berani memberikan penekanan. Sebab petani plasma yang menjadi korban," ucapnya.

Politisi Demokrat Kalbar ini menambahkan bahwa PT. PSP HPI Agro Kalbar sudah tidak ambil pusing saran merevisi nota kesepakatan pada 12 tahun silam yang pernah dibuat. Dengan keputusan tersebut,

Pembkab Mempawah disarankan berani membuat keputusan tegas dan keras.

"Nanti yang akan menindaklanjuti yakni Pemkab Mempawah. Sebab, pemda setempat yang sudah memberi izin mereka. Pemkab Mempawah sebenarnya sudah harus berani mencabut izin, walaupun nantinya terancam digugat. Tidak masalah itu, kalau kita benar," ucapnya. "Pemerintah harus berani membela hak-hak masyarakat, kalau memang masyarakat merasa dirugikan. Itu bentuk pembelaan kita ke petani plasma di Mempawah termasuk Kalbar juga," timpal dia.

Politisi Demokrat Kalbar ini juga berharap petani plasma terus berjuang. Petani harus berani melakukan gugatan ke pengadilan dengan memakai jasa kuasa hukum. Harapannya jelas ada keputusan terkait MOU belasan tahun silam dan isinya merugikan petani plasma. "Petani plasma harus berani gugat ke Pengadilan, daripada tidak ada win-win solution terbaik," ucapnya. **(den)**